



பிணர்ச்சிப் பரவல்
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சு

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சு (பேர்துறை) / தொழில்நுட்ப அமைச்சு
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: brida@baliprov.go.id Pos-el: <https://brida.baliprov.go.id>

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

Daftar Informasi Publik

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen (web/drive)
						Cetak	Soft Copy		
1	Kedudukan/domisili	Berisi tentang kedudukan, domisili alamat lengkap	Sekretaris BRIDA	Kepala Badan	2025	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/berita-bari/berita/kedudukan-dan-alamat/
2	Struktur Organisasi	Memuat struktur organisasi	Sekretaris BRIDA	Kepala Badan	2025	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/berita-bari/berita/struktur-organisasi/
3	Visi dan Misi	Memuat Tentang Visi dan Misi	Sekretaris BRIDA	Kepala Badan	2025	✓		Aktif	
4	Tugas Pokok dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi	Sekretaris BRIDA	Kepala Badan	2025	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/berita-bari/berita/tugas-dan-fungsi/
5	SOP	Memuat informasi tentang SOP yang	Sekretaris BRIDA	Kepala Badan	2025	✓	✓	Aktif	https://brida.baliprov.go.id/sop/



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		ada di BRIDA							
6	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) SKPD	Memuat Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Sekretaris BRIDA	Kepala Badan	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1qAXDOMwW7VzVpXWMuGO6yT6nDIFRY6Bo?usp=sharing
7	Rencana Kerja dan Anggaran	Memuat Tentang Rencana Kerja dan Anggaran BRIDA	Sekretaris BRIDA	Kepala Badan	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1wxivyT5Dl83OHZ_ZMXT1NczMHHOqN88s?usp=sharing
8	Kerangka Acuan Kerja (KAK)Sub. Kegiatan Tahun 2025	Memuat Tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK)Sub. Kegiatan Tahun 2025	Sekretaris BRIDA	Kepala Badan	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1E3nKcy7JVkPl1eeu-QZPrfWnhJepWYMJo?usp=sharing
9	Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2024	Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2024	Sekretaris BRIDA	Kepala Badan	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1aiAfEZl4GFRxCYa_O-Xl4Tx-9a9ZqBft?usp=sharing
11	Surat Keputusan Gubernur Tahun 2025(sudah disahkan)	Memuat Tentang Surat Keputusan Gubernur Tahun 2025.	Sekretaris BRIDA	Kepala Badan	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/10No-agN0ox7Z4w3crfnJhhZBaKHeWPhMj?usp=sharing



Informasi Dikecualikan

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SEMUA UNIT KERJA	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2		Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3		Semua data, surat-surat, laporan, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen



5		Internet Protocol/IP Address Private	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j - UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
6		Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi)
7		Spesifikasi sarana komunikasi Sandi	- UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c - UU No 11 Tahun 2008	Selama sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
8		Sistem Keamanan Elektronik	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas		



			UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
9		Bandwidth Management	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j - UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
10		Peta Lokasi penyimpanan Arsip	- UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Selama masih berlaku	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
11		Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan pimpinan	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan



12		Rencana MoU (kerjasama)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Sampai MoU dilaksanakan	Menghambat proses kebijakan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
13		Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
14		Rencana kerja Anggaran Tahunan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
15		Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



16		Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
17		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	• UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b	Sampai dengan umur konstruksi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



			• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b			
18		Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	• UU No. 5 Tahun 2014 • PP No. 53 Tahun 2010 • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
19		Data Elektronik PNS (Database)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
20		Berkas/Arsip Data Pegawai (PNS/Non PNS) yang klasifikasinya dinyatakan pribadi (kesehatan,	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi



		kondisi keluarga, pendidikan)	UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan			
21		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
22		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
23		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
24		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
25		Dokumen Slip Gaji Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
26		Arsip Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
27		Data individu sensus dan survei	UU No. 14 Tahun 2008	Sampai mendapat persetujuan dari individu survei	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia
28		Identitas pemohon informasi	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pemohon informasi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia
29		Rekam Medis Keselamatan Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Data Diri Pegawai



30		Nomor Rekening Bank Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan kemananan	Menjaga/Melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
31		Dokumen hasil pelaporan kekayaan (LHKPN, LHKASN) dan Pajak	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data

Bali, 18 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Pit. KEPALA BADAN

I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710814 200003 1 010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

